



► EFISIENSI ANGGARAN

# Pemkot Batasi Kuota CPNS 2026

**UMBULHARJO-** Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja memutuskan hanya mengajukan sebanyak 36 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Jumlah tersebut tergolong minim dibandingkan dengan jumlah pegawai yang pensiun yang mencapai 250 orang.

Stefani Yulindriani  
[stefani@harianjogja.com](mailto:stefani@harianjogja.com)

Kepala Badan Kepegawaian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja, Sarwanto menjelaskan kebijakan tersebut diambil sebagai langkah penyesuaian terhadap regulasi dari Pemerintah Pusat, khususnya UU No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), khususnya terkait dengan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total APBD. "Saat ini, belanja pegawai Pemkot Jogja masih berada di angka 36 persen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar sesuai dengan ketentuan," ujarnya, Minggu (5/4).

Sebagai strategi efisiensi, BKPSDM Kota Jogja memilih untuk menekan jumlah pengajuan formasi CPNS

- Saat ini belanja pegawai Pemkot Jogja masih di angka 36%, sehingga butuh penyesuaian.
- Sebanyak 36 formasi CPNS yang diajukan difokuskan pada sektor pelayanan dasar.

agar rasio belanja pegawai tersebut dapat diturunkan secara bertahap.

Dia menuturkan, sebanyak 36 formasi CPNS yang diajukan difokuskan pada sektor pelayanan dasar. Jumlah tersebut terdiri dari 24 formasi untuk tenaga guru dan 12 formasi untuk tenaga kesehatan. Untuk tahun ini Pemkot Jogja tidak membuka formasi CPNS untuk tenaga teknis.

Sarwanto menuturkan meski terdapat selisih cukup besar antara jumlah pegawai yang pensiun dan rekrutmen baru, jajarannya memastikan kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas. BKPSDM telah menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengatasi kekurangan tenaga, terutama di sektor teknis.

Salah satunya upaya yang dilakukan dengan meningkatkan digitalisasi layanan, yang diharapkan dapat menggantikan sebagian peran tenaga teknis. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) juga terus didorong agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. "Optimalisasi kinerja dan peningkatan kompetensi ASN menjadi kunci untuk menjaga agar pelayanan publik kepada masyarakat tetap

optimal," katanya.

### Pangkas Anggaran

Dalam upaya penghematan anggaran, Pemkot Jogja juga membatasi penggunaan BBM untuk kendaraan dinas. Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, menyatakan setiap mobil dinas hanya diperbolehkan mengisi maksimal lima liter BBM per hari. Adapun sepeda motor dinas dibatasi satu liter per hari. Dengan pembatasan ini, Pemkot menargetkan pengeluaran tahunan bisa ditekan, dari Rp10,7 miliar menjadi kisaran Rp6 miliar.

Tak hanya BBM, Pemkot juga mengatur ulang sistem kerja ASN, yakni menerapkan skema *work from home* (WFH) setiap hari Jumat. Selain itu, frekuensi perjalanan dinas juga dipangkas. Perjalanan dalam negeri dikurangi hingga separuh, sedangkan perjalanan luar negeri ditekan lebih jauh.

Efisiensi juga menyasar aset kendaraan. Pemkot akan meletakkan kendaraan dinas yang berusia tua dan tidak efisien. "Tidak semua kebutuhan harus dipenuhi dengan kendaraan dinas. Yang sudah tidak efisien lebih baik dilepas," ujar Hasto.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Mei 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005